

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI STUDI PUTUSAN NOMOR: 701 / PID.B / 2018 / PN MDN

Oleh:

**JUDOF WENJEL PUTRA LASE**  
**170315003**

Masalah pornografi semakin memprihatinkan dari dampaknya kini semakin nyata, sebagai bentuknya, sering terjadinya, perzinahan, pemerkosaan, aborsi, homoseks, pembunuhan, lesbi, gay dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri pertanggungjawaban pidana pornografi telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*Lex Specialist*). Dimana saat ini undang-undang tentang pornografi ada bukan hanya membuat pelaku kejahatan takut, melainkan semakin mencari jalan untuk mengalihkan perhatian aparat penegak hukum. Seperti yang kita ketahui penyebaran pornografi dapat melalui segala aspek dalam kehidupan seperti Internet atau bahkan melalui perdagangan/jual beli, untuk mendapatkan video pornografi saat ini sangatlah gampang yakni melalui internet atau toko-toko atau bahkan penjual kaki lima. Pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu penggambaran tingkah laku seseorang secara erotis dengan tulisan atau lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang bertujuan membangkitkan hawa nafsu. Kejahatan memperjualbelikan DVD pornografi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, setiap pelaku tindak pidana harus ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum agar selanjutnya memberikan efek jera bagi pelaku. Sehingga dengan demikian setidaknya akan menjadi pelajaran dan menjadi jera, terutama ditunjukkan kepada pihak-pihak yang beritikad. Dengan demikian akan menjadi pelajaran terutama ditunjukkan kepada pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan bertindak serupa.

***Kata kunci: hukum, pornografi, memperjualbelikan, peraturan perundang-undangan***

**ABSTRACT**  
**ARTICLE LIABILITY JURIDICAL ANALYSIS**  
**32 LAW NUMBER 44 YEAR 2008**  
**ABOUT PORNOGRAPHY**  
**DECISION STUDY NUMBER: 701 / PID.B / 2018 / PN MDN**

By:  
**JUDOF WENJEL PUTRA LASE**  
**170315003**

The problem of pornography is getting more and more concerning and its impact is now becoming more and more real, as its form, frequent occurrence, adultery, rape, abortion, homosexuality, murder, lesbian, gay and so on. In Indonesia, the responsibility for the crime of pornography has been regulated in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography as a special legislation (Lex Specialist). Where the current law on pornography exists not only makes criminals afraid, but is increasingly looking for ways to divert the attention of law enforcement officers. As we know the spread of pornography can be through all aspects of life such as the Internet or even through trading / buying and selling, to get pornographic videos today is very easy, namely through the internet or shops or even street vendors. Pornography according to the Big Indonesian Dictionary (KBBI) is the erotic depiction of a person's behavior by writing or painting to arouse lust; reading material that aims to arouse lust. The crime of selling pornographic DVDs is an act that is against the law. Therefore, every perpetrator of a criminal act must be dealt with firmly by law enforcement officers so that further it will provide a deterrent effect for the perpetrators. So that at least it will be a lesson and a deterrent, especially shown to parties with good intentions. Thus it will be a lesson especially shown to parties who have bad intentions and act similarly.

***Keywords : law, pornography, trading, laws and regulations***